



RENCANA KERJA (RENJA) **TA. 2026**

DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Karena atas Rahmat dan Karunianya, maka penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Tahun 2026 dapat terwujud.

Renja Dinas Sosial Tahun 2026 adalah panduan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Dinas Sosial, Rencana Kerja tahun lalu sebagai alat yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial periode 2024, analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan pembangunan serta visi kabupaten lampung barat. Selain itu Renja ini juga disusun berdasarkan pada RPJMD Periode tahun lalu sebagai wujud Inflementasi pelaksanaan agenda dan sekaligus dimaksud untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan serta visi Kabupaten Lampung Barat 2023-2026.

Mengingat hal tersebut maka semua Bidang, Seksi dan Staf yang ada di lingkungan Dinas Sosial harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientas pada peningkatan kinerja, untuk mencapai Misi Dinas Sosial “Terwujudnya Kesejahteraan Sosial bagi Masyarakat Lampung Barat yang Berdaya Saing”.

Renja disusun sebagai dokumen perencanaan yang dapat memberikan arahan, menjadi pegangan dalam rangka menyusun program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat yang akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial.

Semoga Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat tahun 2026 terlaksana sesuai dengan target tujuan, sasaran terima kasih diucapkan kepada seluruh Pejabat Kabupaten Lampung Barat, yang telah membantu dalam proses penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat periode 2026, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua.

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Lampung Barat,



JAIMIN, S.I.P

Pembina Utama Muda /IV.c
NIP. 19650814 198503 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	3
BAB II	5
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	5
2.3 Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 7	
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	10
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	31
2.6 Tindak Lanjut Hasil Penilaian Ombudsman Tahun 2024	35
BAB III	40
TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH.....	40
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional	40
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat.....	41
3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2026	41
BAB IV	42
PENUTUP	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) SKPD disusun sejak awal tahapan dalam perencanaan penganggaran, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencanapembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengahdaerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Penyusunan Renja SKPD berpedoman pada Rumusan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Hasil evaluasi Renja Tahun lalu dan Hasil evaluasi Renja tahun berjalan, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran kegiatan. Dengan akan disusunnya Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat tahun 2023-2026, yang penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah. Tentunya, Kabupaten Lampung Barat sebagai daerah otonom telah menjabarkan sasaran-sasaran pokok, arah kebijakan, program-program dan kegiatan pembangunan yang akan dicapai untuk kurun waktu selama empat tahun.

Dalam kurun waktu tersebut diharapkan akan diperoleh kemajuan dan perkembangan di semua sektor pembangunan di Kabupaten Lampung Barat. Dalam kaitan tersebut maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 14 Tahun 2007 sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing menindaklanjuti Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tersebut dengan menyusun Rencana Strategis (Renstra) masing-masing OPD untuk periode 4 tahun dan selanjutnya menyusun Rencana Kerja OPD setiap tahunnya. Keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada kinerja seluruh OPD di daerah yang bersangkutan.

Renja OPD Dinas Sosial akan digunakan sebagai pedoman, landasan dan referensi dalam menentukan skala prioritas yang selanjutnya akan dijabarkan dalam program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan. Dengan demikian Penyusunan Rancangan Awal Renja OPD Dinas Sosial menjadi sangat penting sebagai pedoman kerja dinas agar program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan dapat lebih terarah dan terukur. Lebih Lanjut perumusan Rancangan Awal Renja OPD merupakan dokumen tahunan sesuai dengan sasaran dan target kinerja yang akan dicapai selanjutnya dituangkan dalam Dokumen perencanaan yang lebih konkret dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja OPD Dinas Sosial berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan antara Pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
9. Permendagri 86 Tahun 2017 Tentang Tahapan,Tata cara Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lampung Barat.
11. Perda Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Renja OPD dimaksudkan untuk mengarahkan dan mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki satuan kerja dan mengupayakan sumberdaya lainnya untuk terlibat secara aktif dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

b. Tujuan

Renja dinas ditujukan untuk mengaplikasikan Program Kerja Kepala Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang menjadi ruang lingkup Dinas Sosial ke dalam program-program dan kegiatan untuk direalisasikan. Sehingga diharapkan tujuan pembangunan dapat tercapai.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan Renja 2026 Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat: latar belakang, landasan hukum maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat: Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RPKD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN, PERANGKAT DAERAH

Memuat Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk mencapai dengan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2024 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan jumlah Program termasuk program rutin setelah perubahan banyak 4 (empat) Program, 12 (dua belas) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan. Alokasi dana Tahun 2024 sebesar Rp. 4.825.138.126,- (Empat Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Dua Puluh Enam Rupiah) terealisasi sebesar Rp 4.670.029.133 (Empat Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Seratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) atau 96.79 persen dengan kriteria penilaian realisasi anggaran **“SANGAT TINGGI”**

Dari seluruh sub kegiatan realisasi fisik atau kinerja keluarannya tercapai 100 persen. Berdasarkan indikator sebagaimana yang termuat dalam Renstra Dinas Sosial tahun 2023-2026 tercapai 100%.

Rata-rata pencapaian indikator keluaran pada tahun 2024 adalah sebesar 100 persen.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, maka Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 telah menetapkan tujuan

dan sasaran perangkat daerah sebagai panduan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial sesuai dengan RPD Kabupaten Lampung Barat, ditetapkan Tujuan Dinas Sosial yaitu **“Meningkatnya PMKS Mandiri”**. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkanlah tersebut, Dinas Sosial telah menetapkan Sasaran Strategis, yaitu **“Meningkatnya PMKS yang berdaya”**.

Berikut ini sajian indikator beserta target dan realisasinya yang tertuang dalam table sebagai berikut:

Tabel 2.2 pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat 2024

No	Indikator Sasaran	Formulasi Pengukuran	Target OPD	Realisasi Capaian	Tingkat Capaian
	Persentase Peningkatan PMKS yang Berdaya	(Presentase Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti + Presentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti + Presentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti + Presentase Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti + Presentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana) / 5	87.82%	91.21%	103.86%

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa untuk tahun 2024 target Sasaran Strategis Dinas Sosial dapat tercapai 91.21% dari target 87.82%. Hal ini dapat dijelaskan untuk masing-masing formulasi pengukuran indikator sasaran sebagai berikut:

1. Penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti dengan target sebesar 39.10% dapat

terrealisasi sebesar 56.09%. hal ini disebabkan pada tahun 2023 penyandang disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sebanyak 244 orang ditambah dengan 129 orang pada tahun 2024 dan dibagi dengan jumlah populasi sebanyak 665 orang. Pada tahun 2024 Dinas Sosial Lampung Barat mendapat bantuan dari kementerian sosial berupa alat bantu disabilitas sebanyak 121 orang dan penanganan orang dengan gangguan jiwa sebanyak 8 orang dari APBD. Adapun rincian PMKS penyandang disabilitas yang tertangani adalah sebagai berikut:

- 1) 121 orang Penerima Alat Bantu dan Nutrisi
 - 2) 8 Orang Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa
-
2. Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti sebanyak 21 orang dan dapat terpenuhi 100% berupa bantuan sembako dan nutrisi tambahan dari kementerian sosial
 3. Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti jumlah target sebanyak 241 orang dapat terpenuhi 100% dengan jenis bantuan dan rincian berupa 241 Alat Bantu dan Nutrisi kepada para lansia dari kementerian sosial
 4. Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti berjumlah 1 orang dapat terpenuhi seluruhnya berupa bantuan sembako dan nutrisi tambahan
 5. Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana targetnya yang ditentukan sebanyak 160 paket untuk 320 orang dapat terpenuhi 100%.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan memperhatikan

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial 2023–2026, dirumuskan dalam kerangka pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang komprehensif dan utuh sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Beberapa isu-isu penting yang menjadi kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat diantaranya:

1. Masih Tingginya Angka Penduduk Miskin di Kabupaten Lampung Barat.
2. Masih Banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Belum Mendapat Perhatian dari Pemerintah.
3. Kondisi Geografis kabupaten Lampung Barat, yang merupakan Daerah rawan bencana terutama longsor dan Gempa.
4. Kesenjangan Kesejahteraan Sosial yang cukup Tinggi antara Masyarakat mampu dan tidak mampu.

Dalam menghadapi permasalahan yang ada, perlu dilakukan analisis faktor lingkungan baik internal maupun eksternal dengan pendekatan SWOT, yaitu Strength/Kekuatan, Weakness/Kelemahan, Opportunity/Peluang dan Threat/Ancaman/Tantangan sebagai faktor penentu keberhasilan, dapat digambarkan kondisi internal yang terdiri atas kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

a. Kekuatan/ *Strength*

1. Dukungan anggaran yang relatif besar.
2. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai.
3. Adanya produk peraturan perundang-undangan yang mengatur eksistensi Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas.
4. Sinergitas hubungan yang cukup harmonis antara Dinas Sosial dan OPD lainnya.

b. Kelemahan/ *Weakness*

1. Masih rendahnya SDM yang profesional dibidang kesejahteraan sosial.
2. Kurang memiliki SDM yang terampil dibidang komputerisasi dan pelayanan sosial
3. Masih kurang akuratnya data PMKS

c. Peluang/ *Opportunity*

1. Infrastruktur yang cukup memadai dan dapat dikembangkan.
2. Adanya peluang bagi setiap staf untuk mengikuti kegiatan pengembangan SDM.
3. Adanya potensi SDM mitra Dinas Sosial tingkat kecamatan an pekon yang dapat diberdayakan.

d. Ancaman/ *Tantangan/ Threat*

1. Perkembangan teknologi informasi.
2. Meningkatnya daya kritis masyarakat.

Dengan mengetahui faktor internal dan eksternal tersebut, dapat dilakukan strategi dan kebijakan guna mengatasi permasalahan dan dapat dijadikan pedoman atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya sasaran, tujuan, misi, dan visi. Kebijakan yang dilakukan dalam pengelolaan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat diarahkan untuk mendorong peningkatan profesionalisme kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat dalam rangka mendukung terselenggaranya pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat.

Memperhatikan hal tersebut diatas dan menyikapi dinamika permasalahan sosial, Dinas Sosial mempunyai tugas “Melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang sosial. Terkait dengan tugas tersebut Dinas Sosial mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Sosial;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Sosial;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Sosial;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang Sosial;
5. Pelayanan administrasi.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Sosial dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Sekretariat;
2. Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
4. Bidang Penanganan Fakir Miskin;
5. Bidang Pemberdayaan Sosial;

Sehubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi tersebut, maka Dinas Sosial bertanggung jawab dengan program-program penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang akan diselenggarakan, diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian PMKS, potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dan kelembagaan kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat, serta peran aktif dunia usaha dalam mendukung program dan kegiatan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Barat bertanggungjawab atas penyelenggaraan salah satu prioritas daerah yaitu Penanggulangan Kemiskinan terkait penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Lampung Barat. Apabila melihat usulan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat terkait anggaran yang dibutuhkan guna pencapaian target RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2026 dan usulan Musrenbang Kabupaten Lampung Barat maka anggaran tersebut

cukup memadai, sehingga diharapkan beberapa target kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat dapat tercapai sesuai RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026

Proses review ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan kebutuhan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat terkait pencapaian target kinerja dan tupoksi Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2026 . Mengenai perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat.

Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Liwa, LB	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79.20	4.156.462.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Liwa, LB	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79.20	4.156.462.000	
I.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Liwa, LB	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	22.851.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Liwa, LB	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	22.851.000	Sesuai kebutuhan
			Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun	6 dokumen	26.960.000			Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun	6 dokumen	26.960.000	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 dokumen	35.470.000			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 dokumen	35.470.000	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Liwa, LB	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	22.851.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Liwa, LB	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	22.851.000	Sesuai kebutuhan
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Liwa, LB	Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	6.740.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Liwa, LB	Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	6.740.000	Sesuai kebutuhan
3.	Koordinasi dan Penyusunan	Liwa, LB	Jumlah dokumen Perubahan RKA	2 dokumen	6.740.000	Koordinasi dan Penyusunan	Liwa, LB	Jumlah dokumen Perubahan RKA	2 dokumen	6.740.000	Sesuai kebutuhan

	Dokumen Perubahan RKA-SKPD		SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	n		Dokumen Perubahan RKA-SKPD		SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	n		n
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Liwa, LB	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	6.740.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Liwa, LB	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	6.740.000	Sesuai kebutuhan
5.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Liwa, LB	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	6.740.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Liwa, LB	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	6.740.000	Sesuai kebutuhan
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Liwa, LB	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	3.740.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Liwa, LB	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	3.740.000	Sesuai kebutuhan
7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Liwa, LB	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	31.730.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Liwa, LB	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	31.730.000	Sesuai kebutuhan
II.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Liwa, LB	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	29 orang	2.977.128.200	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Liwa, LB	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	29 orang	2.977.128.200	Sesuai kebutuhan
			Jumlah Laporan	1				Jumlah Laporan	1		

			Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	4.500.000			Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	4.500.000	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	3.000.000			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	3.000.000	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	4.000.000			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	4.000.000	
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Liwa, LB	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	28 Orang	2.965.628.200	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Liwa, LB	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	28 Orang	2.965.628.200	Sesuai kebutuhan
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Liwa, LB	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Liwa, LB	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.500.000	Sesuai kebutuhan
3.	Koordinasi dan Penyusunan	Liwa, LB	Jumlah Laporan Keuangan	2 Laporan	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan	Liwa, LB	Jumlah Laporan Keuangan	2 Laporan	3.000.000	Sesuai kebutuhan

	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD		Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran	n		Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD		Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran	n		n
4.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Liwa, LB	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	4.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Liwa, LB	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	4.000.000	Sesuai kebutuhan
III.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Liwa, LB	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	20.060.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Liwa, LB	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	20.060.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Liwa, LB	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	20.060.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Liwa, LB	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	20.060.000	
IV.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Liwa, LB	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	43.871.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Liwa, LB	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	43.871.000	Sesuai kebutuhan
		Luar LB	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	15.000.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Luar LB	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	15.000.000	Sesuai kebutuhan
1.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Liwa, LB	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	43.871.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Liwa, LB	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	43.871.000	Sesuai kebutuhan
2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Luar LB	Jumlah Pegawai Berdasarkan	3 Orang	15.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Luar LB	Jumlah Pegawai Berdasarkan	3 Orang	15.000.000	Sesuai kebutuhan

	Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan			Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan			n
IV.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Liwa, LB	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	388.603.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Liwa, LB	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	388.603.000	Sesuai kebutuhan
		Liwa, LB	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket			Liwa, LB	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket		
		Liwa, LB	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket			Liwa, LB	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket		
		Liwa, LB	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	8 dokumen			Liwa, LB	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	8 dokumen		
		Liwa, LB	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan			Liwa, LB	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan		
		Liwa, LB	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			Liwa, LB	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Liwa, LB	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	23.984.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Liwa, LB	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	23.984.000	Sesuai kebutuhan
2.	Penyediaan	Liwa,	Jumlah Paket	1 Paket		Penyediaan	Liwa,	Jumlah Paket	1 Paket		Sesuai

	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	LB	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		18.700.000	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	LB	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		18.700.000	kebutuhan
3.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Liwa, LB	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket	45.650.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Liwa, LB	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket	45.650.000	Sesuai kebutuhan
4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Liwa, LB	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	8 dokumen	15.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Liwa, LB	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	8 dokumen	15.000.000	Sesuai kebutuhan
5.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Liwa, LB	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	10.426.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Liwa, LB	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	10.426.000	Sesuai kebutuhan
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	LB dan Luar LB	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	274.843.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	LB dan Luar LB	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	274.843.000	Sesuai kebutuhan
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	LB dan Luar LB	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	8 Unit	68.047.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	LB dan Luar LB	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	8 Unit	68.047.000	
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	LB dan Luar LB	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	2 Unit	40.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	LB dan Luar LB	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	2 Unit	40.000.000	Sesuai kebutuhan
2.	Pengadaan Mebeleur	LB dan Luar LB	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	4 Unit	5.900.000	Pengadaan Mebeleur	LB dan Luar LB	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	4 Unit	5.900.000	Sesuai kebutuhan
3.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	LB dan Luar LB	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	2 Unit	22.147.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	LB dan Luar LB	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	2 Unit	22.147.000	Sesuai kebutuhan
VI.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Liwa, LB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	215.820.000	Penyediaan Jasa Penunjang	Liwa, LB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	215.820.000	Sesuai kebutuhan

	Pemerintahan Daerah		Surat Menyurat	n		Urusan Pemerintahan Daerah		Surat Menyurat	n		an
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan		
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Liwa, LB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Liwa, LB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.000.000	Sesuai kebutuhan
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Liwa, LB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	50.820.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Liwa, LB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	50.820.000	Sesuai kebutuhan
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Liwa, LB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	155.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Liwa, LB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	155.000.000	Sesuai kebutuhan
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Liwa, LB	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	74 Unit	342.651.800	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Liwa, LB	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	74 Unit	342.651.800	Sesuai kebutuhan
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Liwa, LB	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	42 Unit	266.620.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Liwa, LB	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	42 Unit	266.620.000	Sesuai kebutuhan

	Lapangan					Lapangan					
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Liwa, LB	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	26 Unit	20.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Liwa, LB	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	26 Unit	20.000.000	Sesuai kebutuhan
3.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Liwa, LB	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di pelihara /direhabilitasi	2 Unit	56.031.800	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Liwa, LB	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di pelihara /direhabilitasi	2 Unit	56.031.800	Sesuai kebutuhan
B.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Liwa, LB	% PSKS yang aktif	33,51%	434.255.900	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Liwa, LB	% PSKS yang aktif	33,51%	434.255.900	Sesuai Kebutuhan
I.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Liwa, LB	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	45 Orang	434.255.900	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Liwa, LB	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	45 Orang	434.255.900	Sesuai Kebutuhan
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	16 Orang				Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	16 Orang		
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota	3 Lembaga				Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota	3 Lembaga		
1.	Peningkatan Kemampuan	Liwa, LB	Jumlah Orang Mendapat	45 Orang	79.000.000	Peningkatan Kemampuan	Liwa, LB	Jumlah Orang Mendapat	45 Orang	79.000.000	Sesuai Kebutuhan

	Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota		Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota			Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota		Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota			n
2.	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Liwa, LB	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	16 Orang	185.499.900	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Liwa, LB	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	16 Orang	185.499.900	Sesuai Kebutuhan
3.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Liwa, LB	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkatkan kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota	3 Lembaga	169.756.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Liwa, LB	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkatkan kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota	3 Lembaga	169.756.000	Sesuai Kebutuhan
C.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Liwa, LB	Persentase Penyandang disabilitas yang direhabilitasi	78,20%	767.150.000	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Liwa, LB	Persentase Penyandang disabilitas yang direhabilitasi	78,20%	767.150.000	Sesuai Kebutuhan
			Persentase masyarakat miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	13,23%	4.263.064.000			Persentase masyarakat miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	13,23%	4.263.064.000	
			IKM	B	135.000.000			IKM	B	135.000.000	
I.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar. serta	Liwa, LB	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota	30 Orang	635.305.000	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar. serta	Liwa, LB	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota	30 Orang	635.305.000	Sesuai Kebutuhan

	Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, mental, spiritual, dan sosial kewenangan kabupaten/kota	50 Orang				Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, mental, spiritual, dan sosial kewenangan kabupaten/kota	50 Orang		
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar. serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang				Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar. serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang		
			Jumlah Orang yang mendapatkan Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	400 orang				Jumlah Orang yang mendapatkan Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	400 orang		
			Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten/kota	20 Orang				Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten/kota	20 Orang		
1.	Penyediaan Alat Bantu	Liwa, LB	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga	30 Orang	98.000.000	Penyediaan Alat Bantu	Liwa, LB	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga	30 Orang	98.000.000	Sesuai Kebutuhan

			sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota					sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota			
2.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Liwa, LB	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, mental, spiritual, dan sosial kewenangan kabupaten/kota	50 Orang	147.489.000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Liwa, LB	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, mental, spiritual, dan sosial kewenangan kabupaten/kota	50 Orang	147.489.000	Sesuai Kebutuhan
3.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Liwa, LB	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	126.496.000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Liwa, LB	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	126.496.000	Sesuai Kebutuhan
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Liwa, LB	Jumlah Orang yang mendapatkan Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	400 orang	150.000.000	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Liwa, LB	Jumlah Orang yang mendapatkan Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	400 orang	150.000.000	Sesuai Kebutuhan
4.	Pemberian Layanan Rujukan	Liwa, LB	Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten/kota	20 Orang	113.320.000	Pemberian Layanan Rujukan	Liwa, LB	Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten/kota	20 Orang	113.320.000	Sesuai Kebutuhan
II.	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan	Liwa, LB	Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan kabupaten/Kota	550 Orang	4.529.909.000	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan	Liwa, LB	Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan kabupaten/Kota	550 Orang	4.529.909.000	Sesuai Kebutuhan

	Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial					Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial					
			Jumlah orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal kewenangan kabupaten/kota	20.000 Orang				Jumlah orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal kewenangan kabupaten/kota	20.000 Orang		
			Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota	20 dokumen				Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota	20 dokumen		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, mental, spiritual, dan sosial kewenangan kabupaten/kota	90 orang				Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, mental, spiritual, dan sosial kewenangan kabupaten/kota	90 orang		
			Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	25.000 orang				Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	25.000 orang		
			Jumlah Orang yang	17.600 orang				Jumlah Orang yang	17.600 orang		

			mendapatkan Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota					mendapatkan Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota			
			Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota	20 dokumen				Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota	20 dokumen		
1.	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Liwa, LB	Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan kabupaten/kota	550 Orang	135.000.000	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Liwa, LB	Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan kabupaten/kota	550 Orang	135.000.000	Sesuai Kebutuhan
3.	Penyediaan Permakanan	Liwa, LB	Jumlah orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal kewenangan kabupaten/kota	20000 Orang	2.860.000.000	Penyediaan Permakanan	Liwa, LB	Jumlah orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal kewenangan kabupaten/kota	20000 Orang	2.860.000.000	Sesuai Kebutuhan
3	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Liwa, LB	Jumlah orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal kewenangan	90 orang	165.000.000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal kewenangan	90 orang	165.000.000	Sesuai Kebutuhan

			kabupaten/kota					kabupaten/kota			
4	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Liwa, LB	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	25.000 orang	531.064.000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA		Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	25.000 orang	531.064.000	
5	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Liwa, LB	Jumlah Orang yang mendapatkan Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	17.600 orang	557.000.000	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Jumlah Orang yang mendapatkan Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	17.600 orang	557.000.000	
6	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Liwa, LB	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota	20 dokumen	281.845.000	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Liwa, LB	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota	20 dokumen	281.845.000	Sesuai Kebutuhan
D.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	LB dan Luar LB	Persentase data penerima program perlindungan dan jaminan sosial yang valid	100%	1.623.800.000	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	LB dan Luar LB	Persentase data penerima program perlindungan dan jaminan sosial yang valid	100%	1.623.800.000	Sesuai Kebutuhan
		Liwa, LB	Persentase anak yatim dan kube miskin yang mendapatkan bantuan program perlindungan dan jaminan sosial	70,24%	677.150.800			Persentase anak yatim dan kube miskin yang mendapatkan bantuan program perlindungan dan jaminan sosial	70,24%	677.150.800	
I.	Pemeliharaan Anak-anak	Liwa, LB	Jumlah Anak terlantar yang	1250 Orang	327.151.000	Pemeliharaan Anak-anak	Liwa, LB	Jumlah Anak terlantar yang	1250 Orang	327.151.000	Sesuai Kebutuhan

	Terlantar		terpantau dan terpelihara kewenangan kabupaten/kota			Terlantar		terpantau dan terpelihara kewenangan kabupaten/kota			an
1.	Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar	Liwa LB	Jumlah Anak terlantar yang terpelihara kewenangan kabupaten/kota	1250 Orang	327.151.000	Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar	Liwa LB	Jumlah Anak terlantar yang terpelihara kewenangan kabupaten/kota	1250 Orang	327.151.000	Sesuai Kebutuahan
II.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Liwa LB	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang di data	124.151 Orang	1.973.800.000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Liwa LB	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang di data	124.151 Orang	1.973.800.000	Sesuai Kebutuhan
		Liwa, LB	Jumlah Keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin kabupaten/kota	118908 Orang			Liwa, LB	Jumlah Keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin kabupaten/kota	118908 Orang		
		Liwa, LB	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota	17600 Orang			Liwa, LB	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota	17600 Orang		
		Liwa, LB	Jumlah Orang yang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan kabupaten/kota	150 Orang			Liwa, LB	Jumlah Orang yang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan kabupaten/kota	150 Orang		
1.	Pendataan Fakir Miskin Cakupan	Liwa LB	Jumlah Fakir Miskin Cakupan	124151 Orang	571.000.000	Pendataan Fakir Miskin Cakupan	Liwa LB	Jumlah Fakir Miskin Cakupan	124151 Orang	571.000.000	Sesuai Kebutuahan

	Daerah Kabupaten/Kota		Daerah Kabupaten/Kota yang di data			Daerah Kabupaten/Kota		Daerah Kabupaten/Kota yang di data			n
2.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Liwa LB	Jumlah Keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin kabupaten/kota	118908 Orang	87.800.000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Liwa LB	Jumlah Keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin kabupaten/kota	118908 Orang	87.800.000	Sesuai Kebutuhan
3.	Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Liwa LB	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota	17600 Orang	965.000.000	Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Liwa LB	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota	17600 Orang	965.000.000	Sesuai Kebutuhan
4.	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Liwa LB	Jumlah Orang yang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan kabupaten/kota	150 Orang	350.000.000	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Liwa LB	Jumlah Orang yang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan kabupaten/kota	150 Orang	350.000.000	Sesuai Kebutuhan
E.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Liwa LB	Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang disampaikan dalam waktu kurang dari 3 hari setelah laporan diterima	100%	893.000.000	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Liwa LB	Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang disampaikan dalam waktu kurang dari 3 hari setelah laporan diterima	100%	893.000.000	Sesuai Kebutuhan
I.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Liwa LB	Jumlah Orang yang mendapatkan Permakanan 3X1 hari dalam masa tanggap darurat	1000 Orang	193.000.000	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Liwa LB	Jumlah Orang yang mendapatkan Permakanan 3X1 hari dalam masa tanggap darurat	1000 Orang	193.000.000	Sesuai Kebutuhan

			(pengungsian) kewenangan kabupaten/kota					(pengungsian) kewenangan kabupaten/kota			
		Liwa, LB	Jumlah tempat pengungsian kewenangan kabupaten/kota	2 Unit	55.000.000			Jumlah tempat pengungsian kewenangan kabupaten/kota	2 Unit	55.000.000	
		Liwa, LB	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	35 orang	70.000.000			Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	35 orang	70.000.000	
1.	Penyediaan Makanan	Liwa, LB	Jumlah Orang yang mendapatkan Permakanan 3X1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan kabupaten/kota	1000 Orang	193.000.000	Penyediaan Makanan	Liwa, LB	Jumlah Orang yang mendapatkan Permakanan 3X1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan kabupaten/kota	1000 Orang	193.000.000	Sesuai Kebutuha n
2.	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Liwa, LB	Jumlah tempat pengungsian kewenangan kabupaten/kota	2 Unit	55.000.000	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Liwa, LB	Jumlah tempat pengungsian kewenangan kabupaten/kota	2 Unit	55.000.000	Sesuai Kebutuha n
3	Pelayanan Dukungan Psikososial	Liwa, LB	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	35 orang	70.000.000	Pelayanan Dukungan Psikososial	Liwa, LB	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	35 orang	70.000.000	
II.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Liwa LB	Jumlah orang yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga	90 orang	575.000.000	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Liwa LB	Jumlah orang yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga	90 orang	575.000.000	Sesuai Kebutuh an

			Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota					Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota			
		Liwa, LB	Jumlah Kampung yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi, dan pelaksanaan kampung siaga bencana kewenangan kabupaten/kota	2 Kampung				Jumlah Kampung yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi, dan pelaksanaan kampung siaga bencana kewenangan kabupaten/kota	2 Kampung		
1.	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Liwa, LB	Jumlah orang yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	90 orang	325.000.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Liwa, LB	Jumlah orang yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	90 orang	325.000.000	Sesuai Kebutuhan
2.	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Liwa, LB	Jumlah Kampung yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi, dan pelaksanaan kampung siaga bencana kewenangan kabupaten/kota	2 Kampung	250.000.000	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Liwa, LB	Jumlah Kampung yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi, dan pelaksanaan kampung siaga bencana kewenangan kabupaten/kota	2 Kampung	250.000.000	Sesuai Kebutuhan
F	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Liwa LB	% komponen utama taman makam pahlawan	78,57 %	75.645.000	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Liwa LB	% komponen utama taman makam pahlawan	78,57 %	75.645.000	
I	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Liwa LB	Jumlah dokumen hasil rehabilitasi serta	1 dokumen	75.645.000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Liwa LB	Jumlah dokumen hasil rehabilitasi serta	1 dokumen	75.645.000	Sesuai Kebutuhan

	Nasional Kabupaten/Kota		pemeliharaan sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota			Nasional Kabupaten/Kota		pemeliharaan sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota			
1.	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Liwa, LB	Jumlah dokumen hasil rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	1 dokume n	75.645.000	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Liwa, LB	Jumlah dokumen hasil rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	1 dokume n	75.645.000	Sesuai Kebutuha n

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Saat ini proses perencanaan tidak hanya dilakukan secara *top down* akan tetapi juga secara *bottom up* artinya pihak pemerintah juga harus dapat mengakomodir usulan dari masyarakat terkait rencana pembangunan daerah melalui proses Musrenbang. Sehingga dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2025 tentunya Dinas Sosial juga perlu mengakomodir berbagai usulan dari para *stackholders* seperti masyarakat selain program dan kegiatan yang telah dirumuskan oleh Dinas Sosial terkait rencana pencapaian target RPD Kabupaten Lampung Barat dan Renja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026. Proporsi usulan masyarakat yang harus diakomodir oleh Dinas Sosial sebagaimana diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat yakni sebesar 30% dari keseluruhan Program dan Kegiatan pada SKPD.

Usulan dari masyarakat ini diperoleh melalui proses pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrebang) Tingkat Kecamatan yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lampung Barat. Dalam mengakomodir berbagai usulan dari masyarakat terkait pelayanan kesejahteraan sosial tentunya Dinas Sosial perlu memperhatikan kesesuaiannya dengan tugas dan fungsi serta kemampuan secara anggaran dari Dinas Sosial serta berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Dengan hal tersebut yang menyebabkan Dinas Sosial mungkin tidak dapat mengakomodir seluruh usulan rencana pembangunan kesejahteraan sosial dari masyarakat untuk Tahun 2023. Mengenai daftar usulan dari para *stakcholders* (masyarakat) terkait pelayanan.

Tabel 2.5 Usulan program dan kegiatan dari masyarakat pada tahun 2025 saat musrenbang di Seluruh Kecamatan Kabupaten Lampung Barat

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI
1	917656	10-01-2024	Pemberian Bantuan Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE MISKIN) Dinas Sosial	Penambahan Permodalan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau UKM	Pekon Tri mulyo, Kab. Lampung Barat , Kab. Lampung Barat
2	964824	14-01-2024	Pemberian Bantuan Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE MISKIN) Dinas Sosial	masyarakat pekon Sukabanjar II ujung rebun banyak penghasilan ekonomi menengah kebawah	pekon Sukabanjar II Ujung Rembun di 4 Pemnagku, Kab. Lampung Barat
3	972308	15-01-2024	Pemberian Bantuan Alat Bantu Kursi Roda (Dinas Sosial)	diperlukannya bantuan 4 kursi roda bagi masyarakat yang membutuhkan di pemangku yang berada di way empulau ulu	Jalan Piere Tendean Way Empulau Ulu, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, Kab. Lampung Barat, Kab. Lampung Barat
4	973067	15-01-2024	Santunan bagi Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu (Dinas Sosial)	masi banyaknya anak yatim piatu yang sangat membutuhkan bantuan	Truck pengangkut sampah batas pengambilannya hanya sampai Pemangku Negeri Agung 3, sehingga masi ada 4 pemangku yang sampahnya tidak dapat diangkut oleh truck sampah. sehingga sangat memerlukan sekali fasilitas kendaraan untuk mengangkut sampah sampah yan, Kab. Lampung Barat

5	974244	15-01-2024	Pemberian Bantuan Permakanan (Bantuan Sembako Lansia) Dinas Sosial	Perlunya Pemberian Bantuan Permakanan (Bantuan Sembako Lansia) untuk menjamin Para Lansia yang sudah tidak produktif lagi di Pekon Padang Dalam Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat	Pekon Padang Dalam Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, Kab. Lampung Barat
6	999497	16-01-2024	Santunan bagi Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu (Dinas Sosial)	Belum Ada	Kelurahan Sekincau, Kab. Lampung Barat
7	999730	16-01-2024	Pemberian Bantuan Permakanan (Bantuan Sembako Lansia) Dinas Sosial	Untuk kesahatan	Posbindu Kelurahan Sekincau, Kab. Lampung Barat
8	999894	16-01-2024	Pemberian Bantuan Permakanan (Bantuan Sembako Lansia) Dinas Sosial	Pencegahan Stunting	Posyandu Kelurahan Sekincau, Kab. Lampung Barat
9	1000073	16-01-2024	Pemberian Bantuan Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE MISKIN) Dinas Sosial	Bantuan Rumah Layak Huni	Kelurahan Sekincau, Kab. Lampung Barat
10	1000197	16-01-2024	Santunan bagi Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu (Dinas Sosial)	santunan yatim piatu sangat membantu karna termaksud warga kurang mampu dalam lingkup pekon gedung surian	Pekon Gedung Surian, Kab. Lampung Barat
11	1028581	17-01-2024	Pemberian Bantuan Alat Bantu Kursi Roda (Dinas Sosial)	perlunya perhatian dan bantuan untuk penyandang disabilitas fisik	pmk 4,5, Kab. Lampung Barat
12	1028621	17-01-2024	Pemberian Bantuan Permakanan (Bantuan Sembako Lansia) Dinas Sosial	mahalnya sembako dan Sulitnya ekonomi bagi lansia	kembahang, Kab. Lampung Barat

13	1030125	17-01-2024	Pemutakhiran Data Penerima PBI JKN (KIS) Dinas Sosial	Banyaknya masyarakat yang belum mendapat KIS	kembahang, Kab. Lampung Barat
14	1046931	18-01-2024	Pemutakhiran Data Penerima PBI JKN (KIS) Dinas Sosial	Penyediaan Layanan Kesehatan	Pekon Teba Liokh, Kab. Lampung Barat
15	1086117	21-01-2024	Pemberian Bantuan Permakanan (Bantuan Sembako Lansia) Dinas Sosial	Kurangnya kemampuan untuk mencari pekerjaan menyebabkan para Lansia Kekurangan Pendapatan sehingga berpengaruh pada Kebutuhan Sehari-hari	DESA UJUNG, Kab. Lampung Barat
16	1094183	22-01-2024	Pemberian Bantuan Alat Bantu Kursi Roda (Dinas Sosial)	adanya disabilitas yang memerlukan kursi roda sebanyak 7 unit	Pekon Mekar Jaya, Kab. Lampung Barat
17	1094221	22-01-2024	Pemberian Bantuan Alat Bantu Kursi Roda (Dinas Sosial)	adanya disabilitas yang memerlukan alat bantu berjalan (tongkat) sebanyak 7 unit	Mekar Jaya, Kab. Lampung Barat
18	1126904	23-01-2024	Pemberian Bantuan Permakanan (Bantuan Sembako Lansia) Dinas Sosial	banyak lansia yang membutuhkan bantuan	semua pemangku yang ada di pekon sidorejo (9 pemangku), Kab. Lampung Barat
19	1153645	24-01-2024	Pemberian Bantuan Permakanan (Bantuan Sembako Lansia) Dinas Sosial	Masih ada lansia yang membutuhkan dukungan gizi yang cukup sehingga membutuhkan bantuan permakanan (sembako lansia)	Dusun banding, dusun srirejo, dusun gunung sari, dusun sidomulyo, dusun muara jaya, dusun tritunggal, Kab. Lampung Barat
20	1166582	25-01-2024	Santunan bagi Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu (Dinas Sosial)	Pekon memiliki kegiatan rutin santunan untuk anak yatim piatu yang dilaksanakan 2 kali dalam setahun sehingga membutuhkan dukungan agar kegiatan tersebut tetap berjalan	Banding Agung, Kab. Lampung Barat

2.6 Tindak Lanjut Hasil Penilaian Ombudsman Tahun 2024

Tahun 2024 Telah dilaksanakan penilaian kepatuhan pelayanan publik oleh Ombudsman RI terhadap Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat. Berikut hasil dari penilaian tersebut :

i. DIMENSI INPUT

A.1. Kompetensi Pelaksana

No.	Indikator	Bobot	Responden				Hasil Penilaian (%)
			1	2 *	3	4	
1	Pengetahuan tentang komponen standar pelayanan	12.22	80	60	40	100	68
2	Pengetahuan terkait tugas dan kewenangan jabatan	8.40	60	60	100	100	79
3	Pengetahuan tentang lembaga Ombudsman	4.58	60	60	20	60	47
4	Pengetahuan tentang bentuk-bentuk maladministrasi	4.58	100	60	40	100	72
5	Pengetahuan tentang rekomendasi Ombudsman	4.58	100	100	80	100	90
6	Pengetahuan tentang layanan yang ramah kelompok marginal/rentan	3.84	20	40	20	40	29
Kompetensi Pelaksana		38.20	71.97	62.79	53.58	89.17	67.10

Berdasarkan hasil dari penilaian untuk Dimensi Input untuk Kompetensi Pelaksana, Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat telah melaksanakan pembinaan dan pelatihan bersama untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan tentang Standar Pelayanan, Tugas dan Kewenangan Jabatan masing-masing, tentang Lembaga Ombudsman, pengetahuan tentang maladministrasi, rekomendasi Ombudsman dan juga pengetahuan tentang layanan yang ramah kelompok marginal/rentan.

A.2. Sarana Prasarana

No.	Indikator	Bobot	Hasil Penilaian (%)
1	Frekuensi Pengawasan Internal	8.06	80
2	Ketersediaan jumlah petugas sesuai dengan Analisis Beban Kerja (ABK)	8.06	20
3	Ketersediaan jaminan pelayanan	8.06	20
4	Ketersediaan jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	7.31	80
5	Ketersediaan instrumen evaluasi kinerja pelaksana	5.75	100
6	Ketersediaan dasar hukum atas standar pelayanan yang diterapkan	7.31	40
7	Ketersediaan sarana, prasarana, dan fasilitas bagi pengguna layanan	5.85	100
8	Ketersediaan sarana prasarana bagi pengguna dengan perlakuan khusus	5.85	100
9	Ketersediaan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat	5.55	100
Sarana Prasarana		61.80	67.06

Berdasarkan untuk sarana dan prasarana Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat telah melaksanakan pengawasan internal melalui rapat bulanan setiap bulannya. Untuk ketersediaan jumlah petugas sesuai dengan ABK Dinas Sosial telah bersurat kepada BKPSDM Kabupaten Lampung Barat untuk menambah jumlah pegawai Dinas Sosial. Untuk Jaminan Pelayanan Dinas Sosial telah membuat Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor : 22/KPTS/2025 tentang Kompensasi Keterlambatan Pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat. Untuk ketersediaan jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan Dinas Sosial telah memasang CCTV di area Kantor Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat. Sedangkan untuk Ketersediaan dasar hukum atas standar pelayanan yang diterapkan telah di buat Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor :112/KPTS/2025 tentang Standar Pelayanan Dinas Sosial.

B. DIMENSI PROSES

B. Standar Pelayanan

No.	Indikator	Bobot	Produk		Hasil Penilaian (%)
			1	2	
1	Ketersediaan Persyaratan	9.00	100	100	100
2	Ketersediaan Sistem Mekanisme dan Prosedur	9.00	100	100	100
3	Ketersediaan Jangka waktu penyelesaian	10.66	100	100	100
4	Ketersediaan Biaya/Tarif	10.66	100	100	100
5	Ketersediaan Produk Pelayanan	9.00	100	100	100
6	Publikasi Maklumat pelayanan	3.53	100	100	100
7	Subtansi Maklumat Pelayanan	3.53	40	40	40
8	Pelayanan Khusus	7.96	60	60	60
9	Ketersediaan Visi, Misi Pelayanan	7.96	100	100	100
10	Ketersediaan Moto Pelayanan	7.96	100	100	100
11	Ketersediaan Atribut	7.96	100	100	100
12	Ketersediaan Pelayanan Terpadu	12.78	80	80	80
Standar Pelayanan		100.00	92.14	92.14	92.14

Berdasarkan hasil untuk Dimensi Proses untuk Standar Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat telah membuat Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor : 9/KPTS/2023 tentang Moto, Maklumat Pelayanan, dan Nilai-Nilai Dasar Sipil Negara di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat.

Sedangkan Pelayanan Khusus Dinas Sosial telah membuat Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor 23/KPTS/2025 tentang Penunjukan Petugas Pelayanan dan Pelayanan Khusus di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat.

C. DIMENSI OUTPUT

C. Persepsi Maladministrasi

No.	Indikator	Bobot	Hasil Penilaian (%)	Jumlah Responden	
				Wawancara	Via Link
1	Penundaan berlarut	16.80	88.00	3	2
2	Permintaan imbalan	18.40	96.00		
3	Penyimpangan prosedur	18.40	96.00		
4	Tidak kompeten	14.40	92.00		
5	Tidak patut	12.00	96.00		
Persepsi Maladministrasi		80.00	93.50		

Berdasarkan hasil dari Dimensi Output untuk persepsi Maladministrasi Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat telah melaksanakan pembinaan dan pembelajaran bersama mengenai pengertian dan pengetahuan tentang 12 Jenis Maladministrasi.

C.2. SPM/IKM

No.	Indikator	Bobot	Hasil Penilaian (%)
1	IKM/SPM	20.00	60
SPM/IKM		20.00	60.00

Berdasarkan hasil Dimensi output untuk IKM, Dinas Sosial telah melaksanakan penyusunan IKM setiap tahun. Untuk tahun 2024 IKM Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat mutu baik dengan nilai 80,821.

D. DIMENSI PENGADUAN

D. Pengaduan

No.	Indikator	Bobot	Hasil Penilaian (%)
1	Penyelenggara pelayanan melaksanakan kewajiban dalam pengelolaan pengaduan	27.34	60
2	Penyelenggara pelayanan menyediakan sarana pengaduan	13.32	80
3	Penyelenggara wajib melakukan pembinaan terhadap pengelola	12.33	40
4	Penyelenggara pelayanan melaksanakan mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan	20.34	80
5	Jangka waktu penyelesaian pengaduan	11.33	100
6	Pelaksanaan penyelesaian pengaduan	15.34	100
Pengaduan		100.00	74.93

Berdasarkan hasil dari Dimensi Pengaduan, Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat telah melaksanakan rapat rutin bulanan untuk membahas dan melaksanakan pembinaan terhadap pengelola pengaduan termasuk membahas mekanisme dan tata cara pengelola pengaduan jangka waktu penyelesaian pengaduan, pelaksanaan pengaduan termasuk juga menyediakan sarana pengaduan. Berdasarkan hasil pembahasan dalam rapat tersebut dibentuklah Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor: 3.b/KPTS/2025 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan, dan Petugas Administrator Pengelolaan Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Yang dimaksud dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial ialah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut UU Nomor 11 Tahun 2009 sebagai berikut:

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia
5. Usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
6. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga
7. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial berkelanjutan; dan Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat meliputi:

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat tahun 2026, didasarkan pada Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat tahun 2023-2026.

a. Tujuan

Meningkatnya PMKS Mandiri

b. Sasaran dan Indikator Sasaran Renja

Sasaran yang hendak dicapai Dinas Sosial sebagai berikut:

“Meningkatnya PMKS yang Berdaya”

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2026

Berikut ini adalah program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2026, dengan dasarkan pada dokumen RKPD sebagaimana terlampir pada lampiran II.

BAB IV PENUTUP

Demikianlah Renja Organisasi Perangkat Daerah (Renja - OPD) Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2026 ini disusun, selain sebagai pedoman dalam mengemban Tugas Pokok dan Fungsi, Rencana Kerja ini juga merupakan bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang berdasarkan pada Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial.

Agar Rencana Kerja ini dapat mendatangkan manfaat bagi kinerja Dinas Sosial maka perlu dioperasionalkan dan dalam implementasinya perlu komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi dan konsisten yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan oleh segenap aparatur Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat.

Keberhasilan akan seluruh Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat hanya akan terwujud bila seluruh sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan dengan maksimal.

Liwa, 31 Januari 2025
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Lampung Barat,



JAIMIN, S.IP
Pembina Utama Muda /IV.c
NIP. 19650814 198503 1 002

[illegible]

[illegible]

					Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	105	Orang	180.000.000									0		-	0%	0%				
1	6	6	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiap Siagaan Bencana Kabupaten Kota	Jumlah orang yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	90	Orang	2.045.000.000	0	Orang	0	Orang	0	Orang			0	Orang	-	0%	0%		DINAS SOSIAL		
						Jumlah Kampung yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi, dan pelaksanaan kampung siaga bencana kewenangan kabupaten/kota	8	Kampung		0	Kampung	0	Kampung	0	Kampung			0	Kampung	-	0%			DINAS SOSIAL		
1	6	6	2.02	1	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi, dan pelaksanaan kampung siaga bencana kewenangan kabupaten/kota	8	Kampung	905.000.000	0	Kampung	0	Kampung	0	Kampung			0	Kampung	-	0%	0%		DINAS SOSIAL		
1	6	6	2.02	2	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah orang yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	90	Orang	1.140.000.000	0	Orang	0	Orang	0	Orang			0	Orang	-	0%	0%		DINAS SOSIAL		
1	6	7			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	% komponen utama taman makam pahlawan	78,57	%	302.580.000	78,57	%	200.122.280	78,57	%	130.850.046	78,57	%	130.850.046	100%	100%	157,14286	%	330.972.326	200%	109%	DINAS SOSIAL
1	6	7	2.07		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	1	dokumen	302.580.000	2	dokumen	200.122.280	1	dokumen	130.850.046	1	dokumen	130.850.046	100%	100%	3	dokumen	330.972.326	300%	109%	DINAS SOSIAL
1	6	7	2.07	1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	1	dokumen	302.580.000	2	dokumen	200.122.280	1	dokumen	130.850.046	1	dokumen	130.850.046	100%	100%	3	dokumen	330.972.326	300%	109%	DINAS SOSIAL



RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS SOSIAL KAB. LAMPUNG BARAT
TAHUN 2026

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SABARAN	PRAKRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2.465.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Perlu mbuhan Ekonomi. Pemerataan Ekonomi. dan Pemberantasan Kemiskinan	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 4. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan pengurangan kemiskinan	Aparatur		3.465.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	2.505.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Perlu mbuhan Ekonomi. Pemerataan Ekonomi. dan Pemberantasan Kemiskinan	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 4. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan pengurangan kemiskinan	Aparatur		3.505.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	10.275.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Perlu mbuhan Ekonomi. Pemerataan Ekonomi. dan Pemberantasan Kemiskinan	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 4. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan pengurangan kemiskinan	Aparatur	-	12.275.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	10.275.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Perlu mbuhan Ekonomi. Pemerataan Ekonomi. dan Pemberantasan Kemiskinan	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 4. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan pengurangan kemiskinan	Aparatur		12.275.000,00	DINAS SOSIAL

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK BASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	153.575.000,00	Semua Kota/Kab. Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Perlu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Pengentas an kemiskinan secara lepat sasaran 4. Peningka tan nilai tambah ekonomi dan pengur angan kemiskinan	Aparatur		173.575.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	-			12 Unit	34.146.700,00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Perlu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Pengentas an kemiskinan secara lepat sasaran 4. Peningka tan nilai tambah ekonomi dan pengur angan kemiskinan	BMD	-	38.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				8 Unit	10.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Baik Bukit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Perlu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Pengentas an kemiskinan secara lepat sasaran 4. Peningka tan nilai tambah ekonomi dan pengur angan kemiskinan	BMD		8.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	24.146.700,00	Kab. Lampung Barat, Baik Bukit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Perlu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Pengentas an kemiskinan secara lepat sasaran 4. Peningka tan nilai tambah ekonomi dan pengur angan kemiskinan	BMD		30.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-			12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan	126.903.000,00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Perlu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Pengentas an kemiskinan secara tepat sasaran 4. Peningka tan nilai ekonomi dan pengur angan kemiskinan	Aparatur	-	140.903.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengkaku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Perlu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Pengentas an kemiskinan secara tepat sasaran 4. Peningka tan nilai tambah ekonomi dan pengur angan kemiskinan	Aparatur		6.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	52.765.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengkaku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Perlu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Pengentas an kemiskinan secara tepat sasaran 4. Peningka tan nilai tambah ekonomi dan pengur angan kemiskinan	Aparatur		55.765.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	69.138.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengkaku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Perlu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Pengentas an kemiskinan secara tepat sasaran 4. Peningka tan nilai tambah ekonomi dan pengur angan kemiskinan	Aparatur		79.138.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	-			74 Unit	296.860.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 4. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan pengurangan kemiskinan	BMD	-	318.860.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Penzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Penzinannya				36 Unit	251.700.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 4. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan pengurangan kemiskinan	BMD		271.700.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	10.160.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 4. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan pengurangan kemiskinan	BMD		12.160.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirahabilitasi				1 Unit	35.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 4. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan pengurangan kemiskinan	BMD		35.000.000,00	DINAS SOSIAL

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				15000 Orang	430.510.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P omerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Pengentas an kemiskinan secara lepat sasaran 4, Peningka tan nilai tambah ekonomi dan pengur angan kemiskinan	Masyarakat		450.510.000,00	DINAS SOSIAL
3.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase data penerima program perlindungan dan jaminan sosial yang valid Persentase anak yatim dan kube miskin yang mendapatkan bantuan program perlindungan dan jaminan sosial	-			100 % 70,24 %	104.000.000,00						-	154.000.000,00	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang di data	-			124151 Orang	104.000.000,00			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Pengentas an kemiskinan secara tepat sasaran 4, Peningka tan nilai tambah ekonomi dan pengur angan kemiskinan	Masyarakat	-	154.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				124121 Orang	104.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Pengentas an kemiskinan secara lepat sasaran 4, Peningka tan nilai tambah ekonomi dan pengur angan kemiskinan	Masyarakat		154.000.000,00	DINAS SOSIAL
4.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang disampaikan dalam waktu kurang dari 3 hari setelah laporan diterima	-			100 %	178.955.000,00						-	238.955.000,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTJA OPD TAHUN 2024	PRAKRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				1 Dokumen	130.850.028,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari bawah Untuk Perlu mahan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe ntasan Kemiskinan	Pengentas an kemiskinan secara tepat sasaran 4. Peningka tan nilai tambah ekonomi dan pengur angan kemiskinan	Taman Makam Pahlawan		160.850.046,00	CINAS SOSIAL
			JUMLAH					5.841.130.240,00							8.706.482.817,00	